

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Haryadi (2012) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Arma (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai *good governance*. Sedangkan transparansi mempunyai arti keterbukaan, yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan

publik. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Haryadi (2012) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Penyusunan anggaran secara partisipasi diharapkan kinerja manajer akan meningkat, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan atau bawahan manajer akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan, dan mempunyai rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran.

Di dalam organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting sebagai penggerak demi kelancaran jalannya kegiatan usaha. Sukses tidaknya seorang karyawan dalam bekerja akan dapat diketahui apabila perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem penilaian kinerja. Rachmawati (2009) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Komitmen Organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi yang sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan

dengan kepentingan sendiri, serta berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Dengan mempunyai komitmen organisasi yang kuat, maka akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apabila komitmen organisasi itu rendah, maka akan membuat individu untuk melakukan kepentingan dirinya. Namun demikian, dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan membuat kinerja yang lebih tinggi pula.

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang melibatkan banyak pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat rendah (Haryadi, 2012). Masing-masing pihak memainkan perannya dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dan tujuan anggaran. Anggaran yang dihasilkan akan digunakan sebagai tolak ukur bagi kinerja manajer dan para karyawan.

Anggaran juga merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajemen dapat melaksanakan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Partisipasi penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kinerja pemerintah daerah, karena kinerja aparat pemerintah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran juga merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi atau kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Bambang (2005) menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi, akan mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga.

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak diperdebatkan. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Disamping partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran juga dapat meningkatkan kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Haryadi (2012) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada aparat untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh lembaga pemerintah.

Evaluasi anggaran dilaksanakan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut. Evaluasi anggaran adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja.

Pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang menggunakan ukuran-ukuran keuangan salah satunya adalah anggaran. Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai salah satu pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Dengan demikian, anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsinya (Haryadi, 2012).

Abdulah (2005) menyatakan bahwa konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas bertanggung jawab kepada kepala daerah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dibawahnya paling sedikit dua hal penting apabila menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan yang dibuat oleh kepala SKPD. Kedua, penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepada kepala SKPD membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi-operasi dengan efektif dan efisien.

Pengelola keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 pasal 66

ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan sistem akuntansi, penganggaran dan kualitas informasi keuangan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Haryadi (2012) pengaruh pemahaman sistem akuntansi, terhadap kinerja satuan perangkat daerah untuk 84 pejabat eselon tiga dan empat. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman mengenai sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya secara simultan pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dituntut mempunyai kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut dalam mengkoordinasi Aparatur pemerintah daerah. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk lebih berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan.

Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Haryadi (2012). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambah variabel yaitu manajer pengelola keuangan daerah dan obyek penelitian yang berbeda yaitu di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial SKPD**” (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sragen).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
5. Apakah sistem pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?
6. Apakah peran manajer pengelola keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
4. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
5. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.
6. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris pengaruh peran manajer pengelola keuangan daerah terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen, terutama pada teori penetapan tujuan (*goal setting theory*).

2. Bagi Bidang Praktik

Manfaat di bidang praktik diharapkan dapat memberikan implikasi terkait komitmen organisasi karyawan pada organisasi sektor publik, dan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terkhusus untuk bidang keuangan yang berkaitan dengan anggaran

